



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.5/DPRD/IV/2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KAMPAR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKP) BUPATI
KAMPAR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar telah membentuk Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa sesuai Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Bupati Kampar Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
20. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.1071/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 Nomor 28).

Memperhatikan : Laporan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2025 dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar pada tanggal 20 April tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025;

- KEDUA** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan/atau koreksi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selama Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Meminta kepada Bupati Kampar untuk menindaklanjuti Rekomendasi ini guna memperbaiki kinerja Pemerintahan di masa yang akan datang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 20 April 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**
Ketua



AHMAD TARIDI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar

Nomor : Kpts.5/DPRD/IV/2026
Tanggal : 20 April 2025
Tentang : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2025.

1. Sekretariat Daerah:

- a. Secara realisasi anggaran keseluruhan dapat dikategorikan baik, mencapai 89,84%.
- b. Untuk Kerjasama dengan perguruan tinggi/ sederajat diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi. Sebab 3 (tiga) dari 4 (empat) Kerjasama yang telah terjalin, merupakan sekolah kedinasan. Agar beasiswa penuh dapat dinikmati oleh Sebagian besar Masyarakat. Harus adanya Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi/ sederajat yang tersebar diseluruh Indonesia.
- c. Demi menjaga integritas Pemerintah Daerah dalam pemerbitan beasiswa, kami Pansus I meminta transparansi data beasiswa yang tersedia dan berapa yang telah terealisasi.
- d. Bagian Umum Sekretariat Daerah diminta lebih proaktif dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan. Sehingga seluruh bentuk kegiatan dapat terlaksana. Seperti tahun 2024 telah dianggarkan 1.2 milyar, namun tidak dapat terealisasi dikarenakan kurangnya kemampuan bagian umum dalam menjalankan fungsinya.
- e. Pansus I meminta bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTAL) melakukan kajian terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Sebab, Pendidikan dan Olahraga telah memiliki kementriannya masing-masing. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu optimalisasi fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, jika dibawah oleh 2 (dua) kementerian.
- f. Pansus I merekomendasikan, agar Peraturan Daerah (PERDA) tentang BUMD harus disegerakan. Karena masih ada BUMD yang hingga saat

ini belum jelas status hukumnya, seperti BUMD Bumi Kampar Sarana Energi.

- g. Untuk permasalahan tapal batas desa yang menjadi masalah utama terhadap Upaya pemekaran desa. Kami meminta Pemerintah Daerah segera berkomunikasi dengan para petiangku adat setempat, agar dicarikan win-win solution. Sehingga peta administrasi dan peta wilayah adat dapat terintegrasi.
- h. Dalam optimalisasi kinerja bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) yang melaksanakan tugas pada medan-medan yang tak terduga, sebaiknya dipenuhi kebutuhan utama yang menjadi kendala. Seperti kendaraan operasional yang mampu beroperasi pada medan-medan tertentu.

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- a. Pansus I meminta Dispora melakukan kajian yang mendalam terhadap alasan anak yang mengalami putus sekolah. Karena Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan *supporting* terhadap keluarga tidak mampu, agar anak-anaknya dapat menjalankan wajib belajar. Akan tetapi, angka putus sekolah masih cukup tinggi.
- b. Mekanisme dalam penyebaran guru harus berdasarkan Analisis Jabatan (ANJAB) dan berazaskan keadilan, agar terwujudnya kualitas Pendidikan yang merata. Karena fenomena yang terjadi saat ini sumber daya guru yang memiliki kualitas diatas rata-rata lebih cenderung untuk ditugaskan di kota dari pada di daerah-daerah yang jauh dari kota. Tentunya hal ini akan membuat kualitas Pendidikan menjadi tidak merata.
- c. Pansus I menyarankan Dispora tidak hanya mengandalkan data dari Dinas Sosial. Untuk itu, Dispora perlu juga memiliki data khusus Masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pengadaan perlengkapan peserta didik yang menjadi program prioritas bupati.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus membuat stimulan serta bantuan agar masyarakat mengikutsertakan anaknya dalam program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Karena berdasarkan data jumlah anak yang ada di kabupaten Kampar, hanya 20% anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini.

3. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

- a. Demi menjaga dokumen-dokumen penting yang dimiliki PEMDA, maka percepatan Pembangunan Depot harus segera direalisasikan.

4. Dinas Badan Kepegawaian, Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia

- a. Sebagai badan yang mengelola Aparatur Sipil Negara, diharapkan BKPSDM dapat mengawasi kedisiplinan seluruh ASN karena kedisiplinan sangat berdampak pada kinerja.
- b. Untuk penempatan ASN lebih diperhatikan lagi. Diharapkan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.

5. Dinas Kesehatan

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) lebih ditingkatkan lagi, karena telah menjadi tugas wajib Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- b. Pansus I meminta Kepala Daerah segera membayarkan hutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kampar sebesar Rp.18.000.000.000 (18 Miliar Rupiah). Agar RSUD bisa melakukan perbaikan mutu dan kualitasnya.
- c. Pemerintah Daerah juga harus memastikan kesejahteraan kader-kader Kesehatan yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Kampar, terutama kader-kader yang bertugas di Posyandu. Berikan penghargaan yang layak terhadap dedikasinya kepada dunia Kesehatan.
- d. Dinas Kesehatan harus membuat formula, agar dokter yang dimiliki tidak menumpuk disatu wilayah. Karena masih banyak wilayah yang kekurangan tenaga dokter, terutama daerah-daerah terpencil.

6. Dinas Sosial

- a. Pansus I meminta Pemerintah Daerah menghadirkan regulasi tentang *Desif* yang merupakan data pengelompokan Masyarakat sesuai tingkatan. Hal ini agar saat pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
- b. Dinas sosial harus secara kontinyu melakukan pemutakhiran data, agar pemberian bantuan tidak bertumpuk pada beberapa individu

seja. Jika perlu dinas sosial membangun pos-pos khusus dalam melakukan pendataan.

7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

- a. Dalam penyaluran dana hibah harus melalui kajian yang berdasarkan nilai produktifitas terhadap output serta nilai yang akan diterima penerima/kelompok penerima.

8. Dinas Pariwisata

- a. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) lebih di optimalkan lagi, agar Masyarakat yang tinggal di wilayah terdapat potensi-potensi wisata bisa melakukan kegiatan eksplorasi untuk pengembangan wisata. Sehingga masyarakat setempat bisa mendapatkan *value* dari kegiatan tersebut, sekaligus dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Untuk daerah wisata yang telah terbangun, namun terkendala modal usaha dan fasilitas lainnya. Kami Pansus I menyerankan agar dilakukan Kerjasama dengan pihak ke III, agar usaha tersebut tetap dapat lebih produktif.

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

- a. Pansus I meminta Kepala Daerah agar membangun posko-posko Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) setiap Kecamatan, jika perlu setiap Desa. Hal ini merupakan Upaya Tindakan preventif dari pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

10. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

- a. Agar pelayanan maksimal, maka harus dilakukan inovasi "Jemput Bola". Oleh karena itu, kami menyarankan untuk dibuatkan program pelayanan keliling DISDUKCAPIL, dengan menggunakan kendaraan operasional khusus.

11. Dinas Komunikasi Dan Informasi

- a. Kebutuhan atas Sumber Daya Manusia pada DISKOMINFO lebih diperhatikan lagi. Karena tidak banyak pegawai disana yang ahli teknologi, sehingga menyulitkan Diskominfo menjalankan tugasnya.

- b. Peremajaan server utama kita harus jadi prioritas. Karena server kita telah cukup lama tidak dilakukan peremajaan semenjak tahun 2015. Kita harus mengantisipasi terjadinya *overload* pada server yang akan mengakibatkan *chaos* pada seluruh data yang dimiliki setiap OPD di jajaran Pemerintahan Kabupaten Kampar.
- c. DISKOMINFO harus lebih proaktif dalam melakukan penyebaran berita positif tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Kampar, guna untuk menutupi informasi *Hoax* yang beredar dimasyarakat. Untuk itu, harus ada program tersendiri untuk merealisasikan.

12. Sekretariat DPRD

- a. Koordinasi setiap bagian yang ada di Sekretariat DPRD harus sesuai aturan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat mengantisipasi kesalahan dalam menjalankan Tupoksi masing-masing setiap staf sesuai dengan bagiannya.

13. Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Satpol PP sebagai satuan yang mengawal jalannya setiap PERDA yang diterbitkan, juga sebagai penjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat dari dampak Penyakit Masyarakat (PEKAT). Untuk itu Satpol PP harus diberikan payung hukum yang kuat dalam memberantas PEKAT, seperti tempat-tempat prostitusi, judi serta penyakit Masyarakat lainnya.
- b. Satpol PP Desa merupakan suatu program yang sangat perlu di apresiasi dalam keseriusan intansi tersebut menjalankan tugasnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus menjadikan program ini sebagai program prioritas.

14. Inspektorat

- a. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat tentang kurangnya pencapaian terhadap program pengwasan desa, dikarenakan kurangnya personil dari Inspektorat. Namun permasalahan ini telah ditemukan formulanya, sebab akan ada penambahan dari CPNS sebanyak 41 orang. Sehingga Inspektorat bisa lebih efektif melaksanakan seluruh program dan kegiatannya.

- b. Dengan adanya penambahan personil, otomatis akan dibutuhkan juga bangunan baru. Karena bangunan yang dimiliki inspektorat saat ini saja masih kurang kondusif dalam menjalankan tugas.

15. Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

- a. Armada yang saat masih kurang untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kampar, ditambah lagi terdapat 2 (dua) dari 12 (duabelas) armada yang tidak bisa lagi beroperasi. Oleh karena itu, Pansus I menginginkan pengadaan mobil DAMKAR harus menjadi prioritas PEMDA.
- b. Agar tindakan represif didalam penanganan kebakaran bisa lebih efisien, sebaiknya ada pos-pos DAMKAR dengan jumlah yang sesuai kebutuhan disetiap kecamatan.
- c. Dalam pengisian air, sebaiknya DAMKAR memiliki sumber air tersendiri selain mengandalkan sumber air dari PDAM. Sehingga DAMKAR lebih efektif dalam Upaya pengisian air.

16. Urusan Pendapatan

Pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp3,02 triliun dan terealisasi Rp2,93 triliun atau 97,20%. Angka ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (Rp3,009 triliun). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan transfer antardaerah dan lain-lain pendapatan sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi 15,87% dari total pendapatan. Ini tergolong rendah dan menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada dana transfer (84,13%). Pajak daerah mendominasi PAD (65% dari PAD), dengan capaian 102,95%, melebihi target. Ini menandakan bahwa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah cukup berhasil.

Retribusi daerah tercapai 82,07%, dan masih di bawah target. Ini mengindikasikan masih perlunya kerja keras untuk menggali potensi retribusi, dan upaya meningkatkan kepatuhan/efektivitas penagihan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (BUMD) mencapai target 100%, namun nilainya turun drastis dari Rp170 miliar (2024) menjadi hanya Rp36 miliar (2025). Ini tanda serius menurunnya kinerja BUMD. Pendapatan

transfer mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan 2024, terutama dari Transfer Antardaerah yang hanya tercapai 74,44%.

Berdasarkan paparan dalam LKPj, diketahui bahwa ada beberapa masalah klasik seperti PAD masih bertumpu pada pajak daerah (tidak terdiversifikasi), dana perimbangan bersifat *given* (tergantung pusat), ekstensifikasi pendapatan terhambat oleh kewenangan pusat, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah, dan potensi pendapatan belum tergali secara optimal, terutama retribusi dan pemanfaatan aset daerah.

Ketergantungan pada dana transfer, dan kontribusi PAD di bawah 16%, membuat APBD Kampar sangat rentan terhadap kebijakan pemotongan transfer dari pusat (seperti efisiensi anggaran nasional). Capaian retribusi hanya 82% dari target, sementara potensi seperti retribusi parkir, pelayanan kesehatan, dan izin tertentu masih rendah. Hal ini mengingatkan kita semua tentang perlunya inovasi signifikan untuk menggali pendapatan ini. Pendapatan daerah Kampar tahun 2025 secara kuantitatif cukup baik (97,2%), namun secara perlu perhatian serius, karena ketergantungan tinggi pada transfer pusat dan rendahnya diversifikasi PAD. Penurunan drastis pendapatan BUMD dan rendahnya realisasi retribusi serta pajak reklame menjadi pekerjaan rumah serius. Diperlukan reformasi pengelolaan pendapatan, penguatan kelembagaan Bapenda, dan revitalisasi BUMD agar kemandirian fiskal daerah meningkat di tahun-tahun mendatang.

Dari hasil telaah terhadap laporan kinerja BAPENDA, terlihat bahwa laporan yang disampaikan cukup baik dalam menyajikan data realisasi fisik dan keuangan setiap subkegiatan. Hampir seluruh kegiatan tercatat mencapai target fisik 100 persen dengan tingkat serapan anggaran rata-rata 85,25 persen. Saran perbaikannya, BAPENDA perlu menambahkan indikator kinerja utama seperti persentase realisasi PAD terhadap target APBD, tingkat kepatuhan wajib pajak, atau jumlah piutang pajak yang berhasil ditagih pada setiap sub kegiatan.

Analisis Kinerja Anggaran & Strategi Pendapatan Daerah 2025



Kemudian, menyangkut tentang rendahnya realisasi keuangan pada beberapa sub kegiatan yang tidak diikuti dengan analisis penyebab. Misalnya, kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan hanya menyerap 72,98 persen anggaran, sementara fisik 100 persen (8 orang terlaksana). Demikian pula Penagihan Pajak Daerah hanya terealisasi 78,70 persen. Tidak ada penjelasan apakah sisa anggaran akibat efisiensi harga, perubahan kebijakan, atau bahkan ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan. Oleh karena itu, disarankan agar setiap sub kegiatan dengan serapan di bawah 90 persen dilengkapi dengan narasi kausalitas dan langkah perbaikan ke depan, misalnya dengan membuat tabel khusus "deviasi dan tindak lanjut" dalam laporan.

Dari sisi substansi strategis, permasalahan yang diangkat, seperti ketergantungan PAD pada pajak daerah, dana perimbangan yang bersifat given, dan keterbatasan ekstensifikasi akibat kewenangan pusat, sudah tepat, namun solusi yang ditawarkan masih sangat umum. Menjawab tantangan tersebut BAPENDA sebaiknya merumuskan solusi yang lebih konkret dan terukur, misalnya dengan menyusun peta jalan ekstensifikasi pajak berbasis analisis potensi wilayah menggunakan data spasial, mengusulkan revisi Perda tentang jenis pajak yang masih tumpang tindih dengan kewenangan pusat, serta membentuk tim kerja permanen yang berkoordinasi dengan Kanwil DJP dan DJPK setiap triwulan. Selain itu, metode penentuan potensi pendapatan

daerah untuk lima tahun ke depan harus ditingkatkan dari sekadar estimasi administratif menjadi kajian berbasis big data atau survei lapangan yang terstruktur.

Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, Laporan Kinerja BAPENDA akan menjadi alat akuntabilitas publik yang lebih kredibel dan berguna bagi perbaikan kebijakan pendapatan daerah di Kabupaten Kampar.

17. Urusan Perindustrian

Secara umum, laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menunjukkan realisasi fisik yang tinggi untuk sebagian besar kegiatan, dengan total serapan anggaran mencapai 92,04 persen. Namun, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Laporan ini masih berorientasi pada input dan proses, tanpa dilengkapi indikator outcome yang relevan. Misalnya, pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, tercatat 292 orang telah mengikuti pelatihan dengan realisasi keuangan 97,95 persen, tetapi tidak ada informasi mengenai berapa persen dari peserta yang berhasil terserap di dunia kerja setelah pelatihan.

Laporan Capaian Kinerja: Sektor Perindustrian & Tenaga Kerja



Begitu pula pada Program Penempatan Tenaga Kerja, target perluasan kesempatan kerja bagi 1.000 pencari kerja hanya terealisasi 66 orang atau 6,6 persen, namun laporan tidak menjelaskan faktor penyebab kegagalan yang sangat signifikan ini, serta tidak ada analisis apakah rendahnya

capaian disebabkan oleh minimnya lowongan, ketidaksesuaian kompetensi, atau kelemahan dalam strategi penempatan.

Program Penempatan Tenaga Kerja secara keseluruhan hanya terealisasi 35,60 persen secara fisik (target pencaker 1.000, realisasi 66) dan keuangan 35,60 persen. Sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja bahkan tidak mencapai target sama sekali (0 pencaker dari target 100) dengan serapan keuangan hanya 14,76 persen. Perlu ada narasi mengapa Job Fair tidak dilaksanakan, apakah karena pembatalan acara, kurangnya partisipasi perusahaan, atau faktor anggaran yang tidak tersedia.

Untuk permasalahan yang diangkat, seperti sarana prasarana industri belum terbangun, SDM industri terbatas, tingginya pengangguran, rendahnya keterampilan tenaga kerja, dan kurangnya perlindungan pekerja, sudah tepat, tetapi solusi yang ditawarkan masih sangat umum dan belum operasional. Hanya disebutkan "perlu ketersediaan anggaran yang memadai" tanpa rincian langkah konkret, skenario pendanaan, atau target waktu. Masalah yang terjadi bukan hanya anggaran, tetapi juga relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja dan efektivitas mekanisme penempatan. Solusi yang lebih konkret misalnya: melakukan pemetaan kompetensi yang dibutuhkan industri lokal, menyusun kurikulum pelatihan berbasis *demand-driven*, serta membangun kemitraan tetap dengan dunia usaha untuk penyerapan lulusan pelatihan.

Dari sisi teknis, laporan ini masih perlu perhatian dari segi format dan konsistensi. Pada Program Perencanaan Tenaga Kerja, realisasi fisik tercatat 100 persen tetapi realisasi keuangan hanya 72,14 persen (sisa anggaran Rp79 juta). Tidak dijelaskan mengapa dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang sudah selesai tidak menyerap seluruh anggaran. Selain itu, pada sub kegiatan "Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri" (Program Perencanaan dan Pembangunan Industri), satuan volume ditulis "12 Bulan" tetapi realisasi diuraikan menjadi "2 Pameran, 4 Pelatihan, 2 Himtek, 1 Paket Promosi".

Laporan ini belum menyajikan data perbandingan dengan tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat diketahui tren perbaikan atau penurunan kinerja. Misalnya, tingkat pengangguran dan angka penempatan

kerja tahun 2025 apakah lebih baik dari 2024? Demikian pula, belum terlihat adanya indikator kepuasan peserta pelatihan atau evaluasi pasca pelatihan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disarankan menambahkan indikator outcome seperti tingkat penyerapan tenaga kerja terlatih, analisis deviasi untuk setiap sub kegiatan dengan serapan fisik atau keuangan di bawah 80 persen, rencana tindak lanjut yang spesifik dan terukur, serta data komparatif tahunan. Dengan perbaikan tersebut, laporan kinerja akan benar-benar menjadi alat kendali mutu kebijakan ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Kampar.

18. Urusan Keuangan

Pansus II tidak melakukan pembahasan LKPJ bersama OPD terkait karena Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) tidak hadir pada waktu pembahasan. Namun kami tetap melakukan analisis tentang kinerja bidang keuangan, berdasarkan file LKPJ yang sudah ada. Hal ini diharapkan menjadi atensi dari Bupati Kampar demi menjaga marwah dan keseriusan kita dalam menjalankan agenda penting, seperti pembahasan LKPJ.

Secara umum, kinerja keuangan daerah Kabupaten Kampar tahun 2025 menunjukkan capaian administratif yang cukup baik. Dari sisi pendapatan, realisasi mencapai Rp2,935 triliun atau 97,20% dari target, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi 15,87% terhadap total pendapatan, sementara sisanya ditopang oleh dana transfer dari pusat dan provinsi. Meskipun PAD tumbuh 5,37% secara tahunan, capaian retribusi daerah masih 82%, pajak reklame 39%, dan pendapatan dari BUMD menurun dari Rp170 miliar menjadi hanya Rp36 miliar.

Di sisi lain, belanja daerah terealisasi 94,28% dari anggaran. Belanja modal turun 30% dibanding tahun 2024, menjadi Rp301 miliar. Sementara itu, belanja operasi masih mendominasi (75,6% dari total belanja), dengan porsi belanja pegawai mencapai 62,8% dari belanja operasi.

Kabar baiknya, realisasi APBD tidak lagi defisit seperti yang direncanakan; justru tercatat surplus Rp20,06 miliar karena pendapatan lebih besar dari belanja. Namun surplus ini hanya bisa dicapai setelah memanfaatkan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp72 miliar. Sayangnya, penerimaan pembiayaan turun hampir 48% dibandingkan dengan 2024, menandakan SILPA yang tersedia semakin menipis sehingga model penutupan defisit seperti ini tidak berkelanjutan.

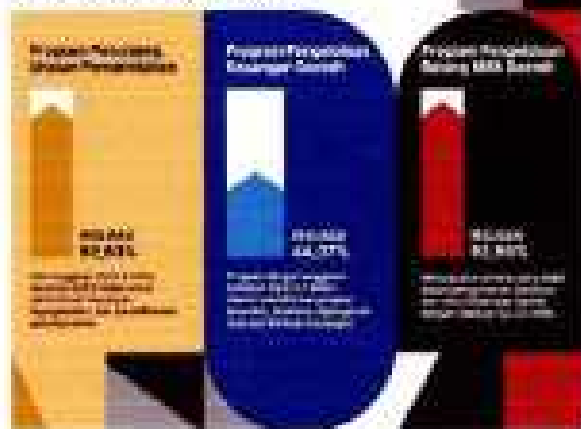
Rasio belanja modal terhadap total belanja masih sekitar 10,33%, ke depan diharapkan mencapai persentase ideal untuk daerah berkembang yakni minimal 15-20%. Selain itu, efisiensi belanja operasional masih perlu ditingkatkan, dan disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Untuk itu, direkomendasikan agar Pemda Kampar melakukan ekstensifikasi dan digitalisasi pajak serta retribusi, merevitalisasi BUMD melalui audit kinerja dan penyertaan modal bersyarat, serta mengalihkan sebagian belanja operasi yang tidak prioritas ke belanja modal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan anggaran ke depan diharapkan semakin realistis, dengan tidak lagi terlalu mengandalkan SILPA untuk menutup defisit, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Kemudian, dari hasil telaah terhadap laporan kinerja BPKAD, ditemukan bahwa data kinerja keuangan BPKAD menunjukkan kondisi yang perlu perhatian kita semua. Total anggaran Urusan Keuangan sebesar Rp443,76 miliar hanya terealisasi Rp201,43 miliar atau 45,39 persen, artinya hampir separuh anggaran daerah di bidang keuangan tidak terserap. Program Pengelolaan Keuangan Daerah bahkan hanya mencapai 44,07 persen dan diberi keterangan "TIDAK TERLAKSANA" secara keseluruhan. Laporan ini belum penjelasan yang jelas mengenai faktor penyebab rendahnya realisasi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Laporan Kinerja Keuangan dan Aset BPKAD: Realisasi & Akuntabilitas Anggaran

Analisa Kinerja Per Program



Ringkasan Eksekutif BPKAD



Detail Sub-Kegiatan Strategis



Sebagai pengelola keuangan daerah, BPKAD disarankan juga melaporkan capaian seperti tingkat ketepatan waktu penyusunan APBD, opini BPK atas LKPD, risiko efisiensi belanja, atau tingkat kepatuhan pengelolaan kas daerah.

Saran dari kami yaitu, pertama, BPKAD perlu menambahkan narasi "Permasalahan dan Solusi" pada LKPD Bagian Urusan Keuangan, yang memaparkan secara jelas mengapa serapan anggaran hanya 45 persen, kegiatan mana yang gagal dilaksanakan dan apa dampaknya terhadap pelayanan publik. Kemudian, setiap sub kegiatan dengan realisasi keuangan di bawah 80 persen hendaknya dilengkapi analisis deviasi dan rencana tindak lanjut yang spesifik.

BPKAD perlu menyusun indikator kinerja outcome yang relevan, seperti waktu penyelesaian laporan keuangan, opini BPK, dan tingkat kepatuhan SKPD terhadap regulasi penganggaran. Keempat, lakukan revisi format laporan dengan mendefinisikan setiap satuan (misal: 1 dokumen = 1 naskah peraturan) dan memastikan volume sesuai dengan realitas operasional.

19. Urusan Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja termasuk dalam wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja: Urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian

Ringkasan Efektivitas Anggaran

Rp13.817.654.096,00

Total Pagu Anggaran

(dari 13.817.654.096,00) (dari 13.817.654.096,00)

(dari 13.817.654.096,00) (dari 13.817.654.096,00)

92,03%

Realisasi Anggaran

(dari 13.817.654.096,00) (dari 13.817.654.096,00)

(dari 13.817.654.096,00) (dari 13.817.654.096,00)



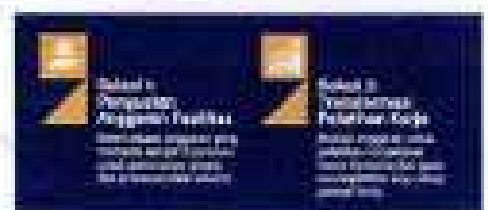
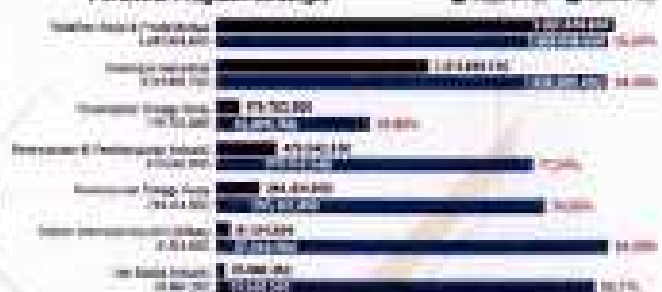
8 Program Utama

(dari 13.817.654.096,00) (dari 13.817.654.096,00)

Analisis Problematika 8 Sektor Strategis



Performa Program Strategis



Dari hasil telaah laporan Urusan Tenaga Kerja, kami menemukan data bahwa sejumlah sub kegiatan pada program penunjang tercantum keterangan "Tidak Terlaksana", hal ini perlu dijelaskan secara jelas, alasan tidak terlaksana, sehingga tidak menimbulkan prasangka yang negatif. Apa kendala yang dialami sehingga tidak terlaksana?

Program Perencanaan Tenaga Kerja terealisasi 79,55 persen (serapan keuangan), Program Penempatan Tenaga Kerja secara keseluruhan hanya menyerap 35,60 persen anggaran, dengan sub kegiatan "Job Fair/Bursa Kerja" hanya 14,76 persen (dari Rp126,5 juta terealisasi Rp18,68 juta). Sub kegiatan "Pengelolaan Informasi Pasar Kerja" juga hanya 24,69 persen. Meskipun realisasi fisik dinyatakan 100 persen untuk beberapa item, angka-angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan penempatan kerja belum dilaksanakan secara optimal. Dinas terkait perlu menjelaskan apakah penyebabnya karena kurangnya peminat, keterbatasan perusahaan peserta, atau masalah koordinasi.

Pada bagian permasalahan dan solusi yang disajikan masih sangat. Permasalahan seperti "sarana prasarana industri belum terbangun", "SDM terbatas", "kurangnya pemanfaatan SDA", "tingginya pengangguran", "rendahnya keterampilan tenaga kerja", "kurangnya akses lapangan pekerjaan", dan "rendahnya perlindungan pekerja" diangkat tanpa data pendukung. Sedangkan solusi yang ditawarkan hanya dua poin yang

bersifat sangat umum dan berulang: “perlu adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk fasilitas sarana prasarana” dan “perlu adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pelatihan”.

Menurut hemat kami, perlu ada solusi strategis seperti peningkatan kualitas pelatihan berbasis kebutuhan industri, kemitraan dengan dunia usaha untuk penyerapan lulusan, atau penguatan sistem informasi pasar kerja.

Untuk perbaikan ke depan, kami menyarankan agar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja wajib melakukan analisis mendalam terhadap penyebab tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan administratif yang bersifat rutin, dan menyusun rencana tindak lanjut yang terukur untuk memastikan semua sub kegiatan perencanaan dan pelaporan dapat berjalan di tahun berikutnya. Setiap sub kegiatan dengan realisasi fisik atau keuangan di bawah 70 persen (apalagi 0%) harus dilengkapi dengan analisis deviasi yang jelas. Khusus untuk program penempatan kerja yang gagal, perlu disusun strategi baru seperti memperkuat kerja sama dengan perusahaan, melakukan *job fair* secara daring, atau mengintegrasikan data pencari kerja dengan bursa kerja online. Kami juga menyarankan agar diberikan penambahan penjelasan yakni indikator outcome seperti tingkat penyerapan tenaga kerja terlatih, tingkat kepuasan perusahaan terhadap lulusan pelatihan, dan penurunan angka pengangguran terbuka. Dengan perbaikan tersebut, laporan kinerja Urusan Tenaga Kerja akan lebih mencerminkan upaya nyata dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Kampar.

20. Urusan Pangan

Secara umum, laporan Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik dengan realisasi anggaran mencapai 98,26 persen dari total Rp5,42 miliar. Hampir seluruh sub kegiatan tercatat memiliki realisasi fisik 100 persen dan serapan keuangan di atas 94 persen.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki lima subkegiatan dengan realisasi tinggi, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai seberapa besar peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Kabupaten Kampar, seberapa besar penurunan

ketergantungan pada beras, atau seberapa banyak masyarakat yang telah mengadopsi pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).

TRANSPARANSI & STRATEGI: KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAMPAR

INDIKATOR KESUKSESAN KEMUNDURAN

98,26%
Indikator Agribisnis

Indikator Agribisnis: 98,26% (dari 100%)
Indikator Agribisnis: 98,26% (dari 100%)
Indikator Agribisnis: 98,26% (dari 100%)

Struktur Organisasi Terintegrasi

- 5 Kecamatan Utama
- 2 Kelurahan
- 32 Desa/Kelurahan

Strategi Pola Pangan

Strategi pola pangan yang mengedukasi masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

PERFORMA BERBASIS PROGRAM

PERMUDAAN (TIDAK BERKONTRIBUSI PADA PROGRAM TERKAIT)

PROGRAM/KEGIATAN	REKORD	PELUKUPAN (%)	REalisasi (%)
Bantuan Gaya Hidup	81.314.000	81.950.000	100,79%
Bantuan/Revisi Perbaikan	100.044.000	97.950.000	97,91%
Perawatan Pangan	62.790.000	61.811.200	98,44%
Perawatan Pangan	120.000.000	119.071.400	99,19%

PERFORMA BERBASIS PROGRAM

Quantifikasi & Monitoring Pangan Beraspadat
Rp200,8 AUTA
Rencana: 200.000.000
Realisasi: 200.000.000

Pengembangan Apresiasi Pangan
Rp100,8 AUTA
Rencana: 100.000.000
Realisasi: 100.000.000

Pengembangan Literasi Pangan
Rp10,8 AUTA
Rencana: 10.000.000
Realisasi: 10.000.000

Intervensi & Konsolidasi Pangan
Rp100,2 AUTA
Rencana: 100.000.000
Realisasi: 100.000.000

ANALISIS MASALAH VS SOLUSI STRATEGIS

MASALAH	SOLUSI STRATEGIS
Adaptasi pangan lokal yang beragam untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.	Penerapan PPH & PPH
Adaptasi pangan lokal yang beragam untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.	Penerapan PPH & PPH

Pada laporan bidang ketahanan pangan, kami menemukan beberapa kesalahan penyajian data yang perlu diperhatikan dan kemungkinan disebabkan oleh human error dalam penulisan. Pada sub kegiatan "Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya" (sub kegiatan 13), volume tercatat 49 unit, realisasi fisik 100 persen (49 unit), tetapi kolom keterangan justru ditulis "TIDAK TERLAKSANA".

Permasalahan yang diangkat, seperti rendahnya pengetahuan PPH, tingginya ketergantungan pada pangan luar daerah, dan masih ditemukannya makanan siap saji yang mengandung zat berbahaya, sudah relevan. Namun, solusi yang ditawarkan masih bersifat umum dan tidak terukur. Solusi seperti "membudayakan konsep Pola Pangan Harapan" atau "menggali potensi pangan lokal" tidak dilengkapi dengan target kuantitatif, jadwal pelaksanaan, atau indikator keberhasilan.

Kepada Dinas Ketahanan Pangan, kami menyarankan agar menambahkan indikator outcome pada setiap program, seperti: skor PPH Kabupaten Kampar, persentase penurunan konsumsi beras per kapita, jumlah desa yang mandiri pangan, dan persentase sampel pangan olahan yang bebas bahan berbahaya.

Perlu dilakukan verifikasi dan koreksi data sebelum pelaporan, terutama pada sub kegiatan yang menunjukkan kontradiksi antara fisik dan keterangan. Untuk kesempurnaan laporan ini, Dinas Ketahanan pangan diharapkan mendefinisikan setiap satuan ukur (misalnya 1 paket = rincian barang/jasa, 1 KWT/desa mandiri = jumlah kelompok wanita tani yang dibina) agar pembaca dapat memahami volume yang dilaporkan. Kami juga menyarankan revisi bagian permasalahan dan solusi harus direvisi dengan membuat keterkaitan yang jelas antara solusi yang diusulkan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, serta dilengkapi target capaian untuk tahun berikutnya.

21. Urusan Perkebunan

Secara umum, Laporan Kinerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan realisasi fisik yang sempurna (100 persen) untuk seluruh subkegiatan, dengan serapan anggaran mencapai 93,25 persen dari total Rp25,79 miliar.

Pada laporan terlihat ada output administratif seperti jumlah dokumen, laporan, paket, atau unit yang dibangun, namun diperlukan informasi yang lebih jelas mengenai seberapa besar peningkatan produksi perkebunan (karet dan sawit) yang tercapai, apakah populasi ternak sesuai target, atau seberapa besar penurunan penyakit hewan menular.



Dalam Perjanjian Kinerja telah ditetapkan target indikator sasaran seperti jumlah produksi karet (89.472 ton), kelapa sawit (4.994.958 ton), populasi kerbau (15.497 ekor), sapi potong (30.785 ekor), persentase penyakit ternak tertangani (28 persen), dan persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna (39 persen). Namun, pada tabel pengukuran pencapaian sasaran belum **disajikan realisasi** dari indikator-indikator tersebut.

Pada laporan Dinas Perkebunan juga belum ditemukan **adanya analisis deviasi** untuk subkegiatan yang realisasi keuangannya rendah. Beberapa subkegiatan menyerap anggaran di bawah 85 persen, misalnya "Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik" hanya 71,41 persen, "Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan" 79,74 persen, "Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian" 82,31 persen, serta "Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor" hanya 84,50 persen. Diharapkan ada penjelasan lebih detail lagi, apakah rendahnya serapan akibat efisiensi, perubahan kebijakan, keterlambatan lelang, atau kendala teknis di lapangan. Padahal, tanpa analisis penyebab, laporan kehilangan fungsi evaluatif dan pembelajaran.

Di bagian penutup hanya disebutkan secara umum bahwa Dinas akan menerapkan strategi seperti peningkatan kualitas SDM, disiplin aparatur, dan akurasi data. Namun, tidak diidentifikasi secara spesifik hambatan yang dihadapi di lapangan, misalnya: terbatasnya akses jalan produksi di kebun masyarakat, rendahnya adopsi teknologi tepat guna oleh petani, kurangnya kesadaran peternak dalam pencegahan penyakit hewan, atau keterbatasan tenaga penyuluh. Tanpa identifikasi masalah yang jelas, solusi yang ditawarkan menjadi tidak terukur dan sulit diimplementasikan.

Saran kami kepada Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu, agar menambahkan indikator outcome pada setiap sasaran strategis, misalnya: realisasi produksi karet (ton), realisasi produksi kelapa sawit (ton), realisasi populasi ternak (ekor), persentase penurunan kasus penyakit hewan menular, serta persentase petani yang benar-benar menerapkan teknologi tepat guna. Data realisasi indikator-

indikator tersebut diisi dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Setiap sub kegiatan dengan realisasi keuangan di bawah 85 persen hendaknya dilengkapi analisis deviasi yang jelas dan rencana tindak lanjut yang terukur. **Pada bagian permasalahan dan solusi yang mengidentifikasi kendala lapangan secara spesifik, misalnya rendahnya kesadaran peternak melaporkan penyakit ternak, keterbatasan alat inseminasi buatan, atau rusaknya jalan usaha tani akibat cuaca, lalu rumuskan solusi dengan target waktu dan indikator keberhasilan.** Kami juga menyarankan agar dilakukan standarisasi satuan ukur, definisikan secara operasional (misal: 1 paket = rincian barang/jasa), dan sajikan data komparatif dengan tahun sebelumnya. Dengan perbaikan tersebut, laporan kinerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan akan menjadi alat akuntabilitas publik yang kredibel dan benar-benar mencerminkan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan di Kabupaten Kampar.

22. Urusan Perdagangan

Secara umum, laporan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK menunjukkan realisasi keuangan yang cukup baik, yaitu 94,31 persen dari total anggaran Rp10,1 miliar, dengan sebagian besar sub kegiatan mencapai realisasi fisik 100 persen.

TRANSPARANSI & KINERJA: LAPORAN URUSAN KOPERASI DAN UMKM DINAS PERDAGANGAN



IDENTIFIKASI TANTANGAN & HAMBATAN

- PERALTA STRUKTURAL, BINAWA KOPERASI**
Rendahnya angka ketersediaan sarana prasarana perdagangan/koperasi dengan standar yang ada yang baik
- DEPAT KOMPETENSI DI SEKTOR UMKM**
Terdapat kesenjangan kompetensi, keterbatasan akses pasar dan akses ke pasar melalui on-line
- KEBERLAIN PERMUDAAN & JERIHAN**
Kondisi lingkungan yang kurang memadai dan persaingan yang semakin ketat yang ketat

RENCANA SOLUSI STRATEGIS

- OPTIMALISASI ALOKASI DANA & SARANA**
Meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan dan perbaikan di lingkungan yang terdampak
- PROMOSI DAN PARTISIPASI BERKAITAN DENGAN UMKM**
Memperluas jaringan pemasaran melalui pameran, festival, pameran, dan lain-lain
- MENINGKATKAN PELAYANAN KOPERASI**
Meningkatkan layanan konsultasi perdagangan melalui pelayanan khusus/khusus yang dapat diakses

Ada beberapa hal yang menurut hemat pansus II perlu diperhatikan. Misalnya, pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, tercatat 110 unit usaha telah diperiksa dengan serapan anggaran 99,59 persen, tetapi belum ada penjelasan mengenai berapa banyak koperasi yang dinyatakan sehat, bermasalah, atau direkomendasikan untuk dibina ulang.

Demikian pula pada Program Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan UMKM, tercatat 12 unit usaha mendapat kemitraan, 200 UMK dikembangkan, namun belum dijelaskan seberapa besar peningkatan omset, perluasan pasar, atau jumlah lain usaha yang berhasil difasilitasi.

Terkait adanya beberapa sub kegiatan dengan realisasi keuangan yang relatif rendah tetapi tetap diberi keterangan "TERLAKSANA", hal ini semestinya diperjelas dengan analisis penyebab. Sub kegiatan "Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor" hanya menyerap 80,73 persen anggaran (sisa sekitar Rp135 juta), sub kegiatan "Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik" serapan 86,92 persen, serta sub kegiatan pemeliharaan kendaraan 88,98 persen. Untuk hal tersebut agar dijelaskan apakah sisa anggaran tersebut akibat efisiensi, adanya layanan yang tidak terpakai, atau kegiatan yang batal.

Terkait permasalahan untuk bidang koperasi hanya menyoroti kurangnya anggaran akibat efisiensi dan kurangnya kendaraan operasional. Masalah ini bersifat input, bukan masalah substantif seperti rendahnya partisipasi anggota koperasi, tingginya koperasi tidak aktif, atau lemahnya tata kelola. Solusi yang diajukan pun sangat administratif, yaitu "mengajukan penambahan dana" dan "meminjam kendaraan ke Sekretariat Daerah". Diharapkan ada solusi strategis seperti program peningkatan kapasitas pengurus koperasi, digitalisasi pengawasan, atau skema kemitraan dengan lembaga keuangan. Untuk bidang UMK, permasalahan yang diangkat cukup relevan (SDM, kualitas produk, perizinan, permodalan), tetapi solusi masih bersifat umum: "mengupayakan peningkatan kapasitas melalui pelatihan" namun belum dijelaskan target kuantitatif, jadwal, atau indikator keberhasilan.

Kami menyarankan agar dinas terkait menjelaskan bagaimana kegiatan yang telah dilaksanakan (misalnya pemberdayaan melalui

kemitraan dengan 12 unit usaha) berkontribusi secara spesifik terhadap solusi tersebut. Setiap sub kegiatan dengan realisasi keuangan di bawah 85 persen agar dilengkapi analisis deviasi dan rencana tindak lanjut.

Terakhir, pada pagian permasalahan dan solusi sebaiknya direvisi dengan mengedepankan masalah substantif (bukan masalah anggaran semata) dan solusi yang terukur.

23. Urusan Penanaman Modal

Dari hasil telah terhadap laporan kinerja DPMPSTP, secara umum realisasi anggaran mencapai 89,90 persen dari total Rp10,88 miliar, dengan sebagian besar sub kegiatan mencapai target fisik 100 persen.



Data menunjukkan sejumlah subkegiatan dengan realisasi keuangan yang relatif rendah, seperti "Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" yang hanya menyerap 75,71 persen (sisa anggaran sekitar Rp139 juta), "Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor" 87,31 persen, serta "Pembuatan Peta Potensi Investasi" 88,64 persen. Kami menyarankan agar dibuat penjelasan penyebabnya, agar kita semua mengetahui apakah rendahnya serapan akibat efisiensi, perubahan kebijakan, lelang gagal, atau kendala teknis lainnya. Akibatnya, laporan kehilangan fungsi evaluatif dan akuntabilitas.

Sehuruh laporan berisi input (anggaran) dan output fisik (dokumen, laporan, paket, unit usaha) dengan capaian 100 persen. Namun, kami

belum melihat informasi mengenai berapa nilai realisasi investasi yang masuk ke Kabupaten Kampar, berapa banyak investor yang difasilitasi, berapa lama rata-rata waktu pengurusan izin, tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap layanan PTSP, atau efektivitas peta potensi investasi dalam menarik minat investor. Padahal, program inti seperti Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal semestinya diukur dengan indikator seperti peningkatan jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), atau penurunan hambatan perizinan.

Saran kami untuk DPMPTSP, agar menambahkan bagian "Permasalahan dan Solusi" pada LKfj ini yang mengidentifikasi kendala substantif dalam penanaman modal, misalnya: rendahnya minat investor karena infrastruktur terbatas, lamanya proses perizinan di tingkat pusat, atau kurangnya promosi potensi daerah. Solusi harus terukur, seperti "menyusun peta potensi investasi digital yang dapat diakses publik", atau "membentuk tim promosi investasi yang melakukan roadshow ke kota-kota besar". Kemudian, perlu ditambahkan indikator outcome pada setiap program, misalnya: nilai realisasi investasi (dalam miliar rupiah), jumlah investor baru yang mendapatkan izin, waktu penyelesaian perizinan rata-rata (hari), serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP. Setiap sub kegiatan dengan realisasi keuangan di bawah 85 persen sebaiknya dilengkapi analisis deviasi dan rencana tindak lanjut. Kami juga menyarankan agar dilakukan standarisasi satuan dan definisi operasional, serta konsisten dalam penggunaan volume yang realistis. Dengan perbaikan tersebut, laporan kinerja DPMPTSP akan menjadi alat kendali mutu yang kredibel dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Kampar.

24. Urusan Perikanan

Dari hasil telaah terhadap laporan kinerja Dinas Perikanan, secara umum realisasi anggaran mencapai 93,32 persen dari total Rp13,34 miliar, dengan sebagian besar kegiatan program inti (pengelolaan perikanan tangkap, budidaya, serta pengolahan dan pemasaran) menunjukkan realisasi fisik 100 persen dan serapan keuangan di atas 95 persen.

Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, tercapai target produksi 2.600 ton dan penyediaan prasarana untuk 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB), tetapi belum dijelaskan apakah produksi tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seberapa besar pendapatan nelayan naik, atau apakah angka penangkapan ilegal dengan bahan berbahaya menurun.

Laporan Kinerja dan Strategi Sektor Perikanan Kabupaten Kampar

93,52% Realisasi Anggaran Total



Salah satu anggaran Rp1,1 triliun yang dihabiskan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar untuk mendukung kegiatan dan tugas pokok.

100% Capaian Fisik Program

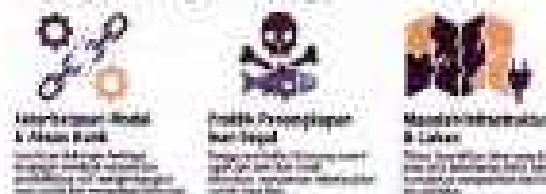


Seluruh program dalam Program Kerja telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan pada tahun ini.

Performa Berdasarkan Program Utama



Tantangan Strategis di Lapangan



Arah Solusi & Masa Depan



Laporan tidak menyajikan data capaian yang menunjukkan perbaikan atas masalah-masalah krusial tersebut, sehingga sulit menilai efektivitas intervensi Dinas Perikanan. Selanjutnya, sejumlah sub kegiatan pada program penunjang yang memiliki realisasi keuangan sangat rendah namun tetap diberi keterangan "TERLAKSANA" atau "TERLAKSANA SESUAI KEBUTUHAN", hal ini perlu penjelasan analisis penyebab. Sub kegiatan "Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor" hanya menyerap 64,58 persen anggaran, "Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan" 66,48 persen, "Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik" 72,57 persen, dan "Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya" hanya 58,67 persen. Sebaiknya dijelaskan, apakah sisa anggaran akibat efisiensi, kegiatan yang batal, atau layanan yang tidak optimal. Keterangan "sesuai kebutuhan",

agar dibuat uraian lebih lanjut sehingga tidak bersifat subjektif dan tidak dapat diverifikasi.

Pada bagian permasalahan dan solusi. Daftar permasalahan yang diangkat cukup lengkap (14 poin) dan mencerminkan tantangan nyata di sektor perikanan, seperti rendahnya kualitas SDM, keterbatasan modal, minimnya infrastruktur, konflik lahan, ancaman penyakit ikan, hingga penangkapan ilegal. Namun, solusi yang ditawarkan sebanyak 5 poin yang masih sangat umum dan belum operasional, seperti "Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam" atau "Peningkatan skala usaha dan produksi". Sebaiknya diperjelas lagi agar tampak keterkaitan antara solusi dengan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

25. Urusan Pertanian

Secara umum realisasi anggaran Dinas Pertanian mencapai 93,14 persen dari total Rp35,24 miliar, dengan beberapa program inti seperti penyediaan prasarana pertanian dan penyuluhan menunjukkan capaian fisik yang cukup baik.

LAPORAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN KAMPAR

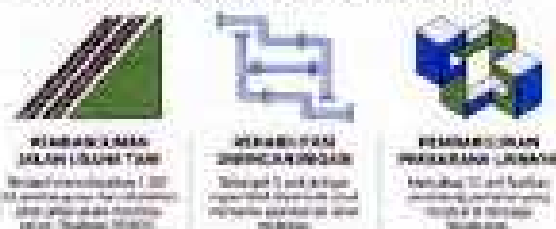
RINGKASAN EKSEKUTIF



ALOKASI & CAPAIAN BERDASARKAN PROGRAM



SOROTAN PEMBANGUNAN FISIK (PRASARANA)



TANTANGAN & SOLUSI STRATEGIS



Namun, pada laporan disajikan output seperti volume jalan usaha tani yang dibangun (1.562 m²), jumlah kecamatan yang mendapat pendampingan (21 kecamatan), atau unit irigasi yang direhabilitasi. Dinas terkait disarankan menyajikan menambahkan informasi mengenai

peningkatan produktivitas tanaman, luas panen, penurunan alih fungsi lahan, atau adopsi teknologi oleh petani.

Sejumlah subkegiatan dengan realisasi fisik dan keuangan yang rendah namun tetap diberi keterangan "TERLAKSANA" atau "TERLAKSANA SESUAI KEBUTUHAN", hal ini agar disajikan analisis penyebabnya. Sub kegiatan "Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian" terealisasi 62,48 persen secara fisik (dari target 2 kegiatan hanya tercapai 1) dan keuangan 62,48 persen. Sub kegiatan "Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani" hanya mencapai 5 unit dari target 7 unit (85,23 persen) dengan serapan keuangan 71,29 persen. "Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor" menyerap 63,95 persen anggaran, dan "Pembinaan serta Pengawasan Iain Usaha Pertanian" 78,05 persen. Kami menyarankan agar dijabarkan, apakah rendahnya capaian disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, keterlambatan belang, perubahan kebijakan, atau faktor cuaca dan bencana. Sebab, rehabilitasi irigasi sangat krusial bagi produktivitas pertanian, sehingga kegagalan pencapaian target harus dianalisis secara mendalam.

Pada bagian permasalahan dan solusi yang sangat umum, belum terukur, dan bahkan belum relevan dengan periode laporan. Permasalahan hanya disebutkan empat poin singkat yakni sosial budaya masyarakat lemah, rendahnya adopsi teknologi, terbatasnya benih bermutu, dan alih fungsi lahan. Kami belum melihat ada data pendukung seperti luas lahan yang beralih fungsi, persentase petani yang menggunakan benih unggul, atau tingkat adopsi teknologi spesifik. Solusi yang ditawarkan sangat normatif, seperti "menyatukan persepsi" dan "meningkatkan kerja sama dengan stakeholder", serta mencantumkan visi tahun 2022 yang sudah lewat. Keterkaitan antara solusi dengan subkegiatan yang telah dilaksanakan masih minim, misalnya bagaimana program penyuluhan pertanian (anggaran Rp729 juta, serapan 91,45 persen) secara spesifik mengatasi rendahnya adopsi teknologi, atau bagaimana program pengendalian OPT (anggaran Rp551 juta, serapan 90,83 persen) berkontribusi terhadap peningkatan produksi.

Berdasarkan analisis tersebut, kami menyarankan agar setiap subkegiatan dengan realisasi fisik atau keuangan di bawah 80 persen agar dilengkapi dengan analisis deviasi dan rencana tindak lanjut yang spesifik, misalnya, kegagalan rehub irigasi karena akses lokasi terhambat banjir akan dijadwalkan ulang pada musim kemarau. Bagian permasalahan dan solusi disarankan untuk direvisi secara substansial, gunakan data kuantitatif untuk setiap masalah, dan rumuskan solusi yang terukur serta terkait langsung dengan kegiatan yang telah atau akan dilaksanakan.

26. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Secara umum, laporan Dinas Perkim menunjukkan realisasi keuangan yang sangat baik, mencapai 98,61 persen dari total anggaran Rp32,78 miliar, dengan hampir seluruh kegiatan program inti seperti pencegahan kawasan kumuh, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), dan penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) mencapai target fisik 100 persen serta serapan anggaran di atas 99 persen. Pada pernyataan di akhir laporan yang menyebutkan "secara garis besar tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan".

Laporan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Pencapaian Fisik Kegiatan



Akan tetapi di sisi lain, pada sub kegiatan "Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan" hanya menyerap 21,48% anggaran (dari Rp87,24 juta hanya terealisasi Rp18,74 juta), meskipun secara fisik 4 orang peserta dinyatakan 100 persen terlaksana. Jika

kegiatan bimtek dengan peserta 4 orang hanya membutuhkan biaya seperlunya dari anggaran. Hal ini seharusnya dijelaskan, apakah terjadi efisiensi besar-besaran, pembatalan sebagian materi, atau kesalahan perencanaan anggaran.

Laporan hanya menyajikan output seperti 300 unit RTLH diperbaiki, 19 unit rumah baru dibangun, 20 lokasi PSU disediakan, serta 50 laporan koordinasi. Namun, tidak ada informasi mengenai seberapa besar penurunan luas kawasan kumuh, peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan, tingkat kepuasan penghuni rumah layak huni, atau efektivitas PSU dalam menunjang fungsi hunian.

Pada bagian "Permasalahan dan Solusi" yang substantif. Hanya disebutkan "tidak ada permasalahan". Namun dari data LKPj terlihat adanya potensi masalah seperti rendahnya serapan bimtek yang tidak dianalisis. Selain itu, secara substansi, dinas yang mengelola perumahan dan kawasan kumuh seharusnya mengidentifikasi tantangan lapangan seperti keterbatasan lahan, konflik kepemilikan tanah, partisipasi masyarakat yang rendah, atau koordinasi dengan pengembang.

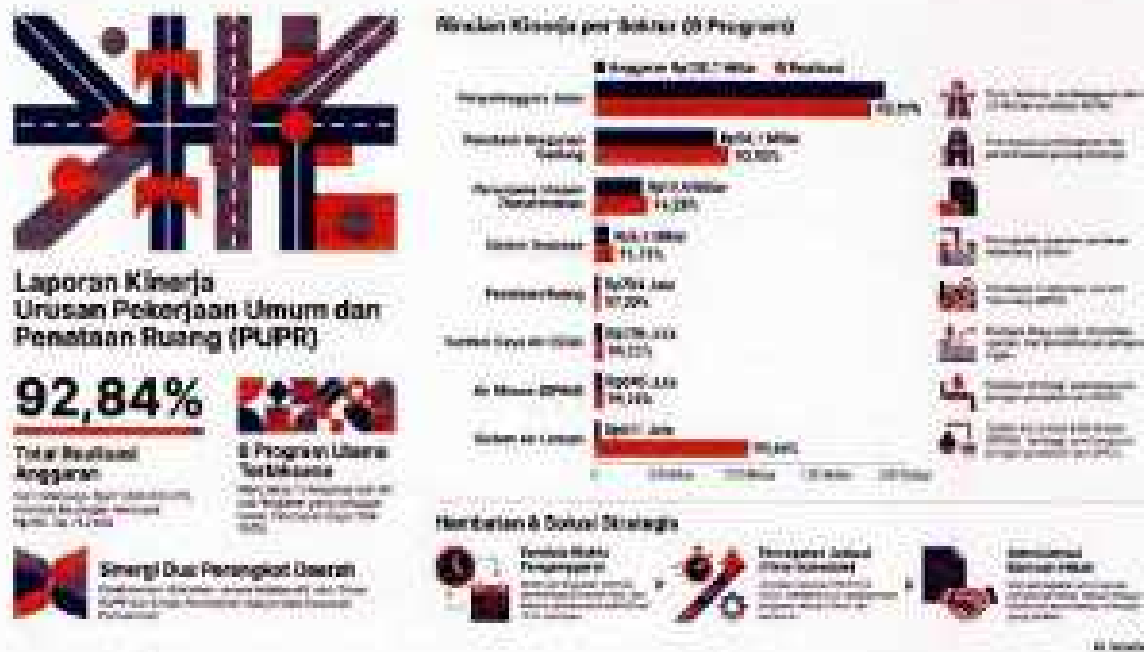
Kami menyarankan Dinas Perkim wajib melakukan analisis deviasi untuk setiap sub kegiatan dengan realisasi keuangan di bawah 80 persen, terutama bimtek dengan serapan 21,48 persen, dan menyajikan penjelasan kausal serta rencana tindak lanjut yang terukur, tidak hanya keterangan "sesuai kebutuhan". Kedua, tambahkan indikator outcome pada setiap program, misalnya: persentase pengurangan luas kawasan kumuh, jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, dan tingkat akses terhadap PSU. Bagian permasalahan semestinya diisi secara jelas dengan data pendukung, misalnya "masih terdapat 15 persen RTLH yang belum tertanganj karena keterbatasan anggaran" atau "verifikasi PSU dari pengembang sering terlambat".

27. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DPRD tidak melakukan pembahasan LKPj bersama OPD terkait karena yang hadir adalah Pih Kabid. Sesuai amanah paripurna, kami tidak melanjutkan pembahasan, karena pembahasan tidak boleh diwakilkan.

Namun kami tetap melakukan analisis tentang kinerja PUPR berdasarkan file LKPJ yang sudah ada di internal pansus II.

Secara umum realisasi anggaran mencapai 92,84 persen dari total Rp211,9 miliar, dengan sejumlah program strategis seperti penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan sumber daya air menunjukkan capaian fisik yang cukup baik.



Namun, sayangnya pada laporan tidak terdapat indikator kinerja outcome yang mengukur dampak nyata dari infrastruktur yang dibangun. Laporan hanya menyajikan output seperti panjang jalan yang dibangun (20 km), rekonstruksi jalan (15 km), pembangunan jembatan (40 km), peningkatan sistem drainase (2.000 meter), atau pembangunan SPAM (50 liter/detik). Tidak ada informasi mengenai seberapa besar peningkatan konektivitas antar wilayah, pengurangan waktu tempuh, penurunan genangan banjir, atau peningkatan akses air bersih bagi masyarakat.

Sejumlah sub kegiatan dengan realisasi fisik dan keuangan yang sangat rendah, namun tidak dianalisis secara memadai. Sub kegiatan "Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan" hanya mencapai 12,5 persen secara fisik (25 meter dari target 200 meter) dengan serapan keuangan hanya 25,91 persen. Sub kegiatan "Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya" tercatat volume 0, realisasi 0, dengan serapan keuangan 30,51 persen dan diberi keterangan "TIDAK TERLAKSANA". Sub kegiatan

"Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan" hanya menyerap 24,93 persen anggaran, "Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik" 76,77 persen, serta "Pemeliharaan Jalan" (pembangunan jalan) hanya 88,50 persen. Sebaiknya dijelaskan penyebab rendahnya capaian operasi drainase yang sangat krusial untuk pencegahan banjir, apakah karena kendala cuaca, keterlambatan lelang, atau kurangnya koordinasi. Keterangan "DILAKSANAKAN SESUAI KEBUTUHAN DI LAPANGAN" untuk drainase yang hanya terealisasi 12,5 persen, hal ini kami harapkan dapat diperjelas agar tidak dianggap sebagai data subjektif.

Saran perbaikan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Actiap sub kegiatan dengan realisasi fisik di bawah 80 persen agar dilengkapi analisis deviasi yang jelas, misalnya "Operasi drainase hanya 25 meter karena keterbatasan alat berat akibat musim hujan, akan diselesaikan pada triwulan pertama tahun berikutnya." Hindari pernyataan umum seperti "diesuaikan kebutuhan lapangan" tanpa bukti yang kuat; gunakan data dan dokumen pendukung.

Bagian permasalahan dan solusi kami sarankan untuk direvisi dengan menyebutkan kegiatan spesifik yang bermasalah, faktor penyebab, dan rencana aksi dengan target waktu. Contoh: "Meningkatkan realisasi operasi drainase dari 25% menjadi 90% pada tahun 2026 dengan mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin lebih awal dan menyewa alat berat sebelum musim hujan."

28. Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp27,54 miliar dengan realisasi mencapai sekitar 95,28% (setara Rp26,24 miliar). Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik, mengindikasikan bahwa secara administratif dinas mampu menjalankan sebagian besar kegiatan yang direncanakan.

Laporan Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup

Efektivitas Program, Penyerapan Anggaran, & Status Sub-Kegiatan



INDIKATOR DESKRIPTIF

Deserpsi Anggaran



Status Anggaran



Realisasi Program



Realisasi Sub-Kegiatan



OPERASIONAL & ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH



Uraian dan rincian data operasional & administrasi perangkat daerah

Program Melakukakan KAJ (KAK)



Kelembagaan & Anggaran Lingkungan



PROGRAM TEKNIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN



EVALUASI SOLUSI STRATEGIS



Dari sisi program teknis, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan 14 program, mulai dari penunjang urusan pemerintahan hingga program penghargaan lingkungan. Beberapa program utama seperti **Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup** dan **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** tercatat terlaksana dengan persentase realisasi keuangan yang tinggi (masing-masing 75,2% dan 97,46%). Namun, jika diteliti lebih dalam, terdapat beberapa **kegiatan yang tidak terlaksana sama sekali** atau realisasinya sangat rendah. Misalnya, pada Program Pengendalian Pencemaran, dua subkegiatan krusial, yaitu "Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran" dan "Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup", dinyatakan **TIDAK TERLAKSANA**.

Selain itu, pada Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah, sub kegiatan "**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung**" juga tidak terlaksana. Pada Program Penyediaan Jasa Penunjang, realisasi untuk "**Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**" mencapai 70,46%, menandakan adanya keterbatasan operasional dalam pemenuhan kebutuhan dasar kantor. Program Penghargaan Lingkungan juga mencatat realisasi rendah (85% untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan 92% untuk penilaian kinerja masyarakat), yang berarti upaya memberikan apresiasi kepada masyarakat atau lembaga yang peduli lingkungan belum optimal.

Pansus II menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup harus **melakukan evaluasi ulang terhadap seluruh kegiatan yang tidak terlaksana** dan menyusun rencana aksi yang terukur dengan target waktu yang jelas. Kemudian, **perkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum** dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan inspeksi, pemantauan kualitas air dan udara, serta penindakan terhadap pelanggar lingkungan. DLH diharapkan **mengoptimalkan koordinasi lintas sektor** dengan Dinas Perindustrian, Perkebunan, dan Satpol PP untuk pengendalian pencemaran dari sumber industri dan perkebunan.

DLH diharapkan meningkatkan **sosialisasi dan partisipasi masyarakat** melalui program penghargaan lingkungan yang lebih masif, misalnya lomba desa bersih dan hijau, agar kesadaran lingkungan tumbuh dari akar rumput. Dengan langkah-langkah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya unggul dalam penyerapan anggaran, tetapi juga **memberikan dampak nyata bagi perbaikan kualitas lingkungan hidup** di Kabupaten Kampar.

29. Urusan Perhubungan

Berdasarkan laporan realisasi per Desember 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar mengelola pagu anggaran sebesar **Rp47,36 miliar** dengan realisasi keuangan mencapai **99,05%** dan realisasi fisik **100%**. Angka ini secara administratif sangat baik, menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan hampir seluruh anggaran terserap. Tingkat penyerapan yang hampir sempurna mengindikasikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan di Dishub tergolong **efektif dan efisien**.



Dari rincian kegiatan pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** (yang menyerap 28,25% dari total pagu), hampir semua subkegiatan mencapai target fisik 100% dan realisasi keuangan di atas 97%. Beberapa subkegiatan bahkan mencapai 100% realisasi keuangan, seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN (98,65% - mendekati sempurna), koordinasi penyusunan laporan, serta penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Namun, terdapat beberapa catatan: realisasi keuangan untuk **"Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"** mencapai **93,05%**, lebih rendah dibandingkan subkegiatan lain. Meskipun secara fisik tetap 100% (artinya pekerjaan pemeliharaan selesai), adanya selisih anggaran sebesar sekitar 7% yang tidak terserap menunjukkan kemungkinan adanya **efisiensi biaya** atau **harga satuan yang lebih rendah** dari perkiraan, atau sebaliknya, ada kegiatan yang tidak sepenuhnya terlaksana namun dilaporkan fisik 100% - perlu diverifikasi. Selain itu, sub kegiatan **"Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik"** terealisasi 99,34%, masih dalam batas wajar.

Dari berbagai capaian tersebut, pansus tidak menemukan **penjelasan mengenai permasalahan** pada kolom yang disediakan (semua baris

permasalahan kosong). Padahal, realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% pada beberapa sub kegiatan seharusnya dijelaskan penyebabnya, misalnya karena efisiensi anggaran, perubahan harga, atau kendala teknis. Selain itu, laporan hanya menampilkan program penunjang; tidak tersedia data realisasi untuk **program inti** seperti Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pengelolaan Pelayaran, Pengelolaan Penerbangan, dan Perkeretaapian. Tanpa data tersebut, kita tidak dapat melihat capaian kinerja substantif Dishub, seperti peningkatan keselamatan lalu lintas, perbaikan rambu-rambu, pengujian kendaraan bermotor, atau pelayanan angkutan umum.

30. Urusan Perencanaan

Sebagaimana kita ketahui bahwa urusan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dari hasil telah laporan Bappeda, secara umum realisasi anggaran mencapai 97,18 persen dari total Rp17,49 miliar, dengan sebagian besar subkegiatan pada program penunjang dan program perencanaan menunjukkan capaian fisik 100 persen serta serapan keuangan di atas 95 persen.

Sebagai OPD yang bertanggung jawab menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD, serta melakukan koordinasi, evaluasi, dan litbang, Bappeda perlu melaporkan indikator seperti tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pembangunan, persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD, kualitas dokumen perencanaan yang mendapat penilaian dari provinsi atau kementerian, serta pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi dalam kebijakan daerah.

Laporan Akuntabilitas & Realisasi Anggaran Bappeda

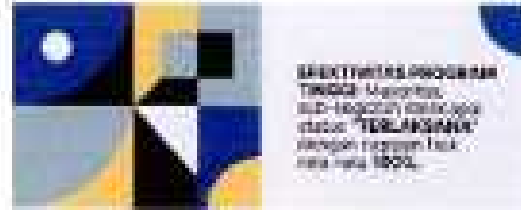
DIREKTORAH EKSEKUTIF PELENGKAP

Rp 17.495.515.114 **97,18%**

Teri Kap. Anggaran

Realisasi Anggaran
Rp 16.922.116.522

Laporan ini menyajikan kinerja pelaksanaan dari Program Bappeda sebagai 55 kegiatan dari 41 sub-kegiatan yang nature dan aktifitas pelaksanaannya dengan efisien.



PERFORMA BERDASARKAN PROGRAM UTAMA

REKONSTRUKSI DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS



PERENCANAAN, PERENCANAAN & SISTEMASI



KOORDINASI & KEMERDEKAAN BERKUALITAS



PENELITIAN & PENGEMBANGAN DASAR



© Bappeda

Sub kegiatan "Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan" hanya menyerap 43,75 persen anggaran (dari Rp8 juta terealisasi Rp3,5 juta), sub kegiatan "Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor" 87,91 persen, serta "Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan Bidang Perekonomian" 93,52 persen. Kami menyarankan agar dijelaskan lebih lanjut mengapa bintek hanya terserap kurang dari setengah anggaran, apakah karena jumlah peserta berkurang, efisiensi biaya, atau kegiatan batal sebagian.

Pada bagian permasalahan dan solusi, narasi penjelasan tergolong singkat. Permasalahan yang diangkat ada tiga poin: perubahan regulasi yang mempengaruhi sistem perencanaan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian pelaksanaan perencanaan, dan perlu dituangkan hasil litbang dan inovasi daerah ke dalam RKPD serta DPA perangkat daerah. Ketiga masalah ini sebenarnya cukup relevan, namun akan lebih baik lagi jika dilengkapi dengan data atau bukti empiris.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan, kami menyarankan kepada Bappeda agar setiap subkegiatan dengan realisasi keuangan di bawah 80 persen sebaiknya dilengkapi dengan analisis deviasi yang jelas dan rencana tindak lanjut, misalnya, untuk bintek yang serapannya rendah, agar dijelaskan penyebabnya.

Pada bagian permasalahan dan solusi dapat diperkaya dengan data pendukung dan target yang spesifik, serta dihubungkan dengan subkegiatan yang telah dilaksanakan. Bappeda juga diharapkan menyajikan laporan tentang rekomendasi hasil litbang yang sudah diadopsi oleh kepala daerah atau OPD, serta inovasi daerah yang telah diterapkan.

Pada kesempatan ini, kami mengapresiasi kinerja Bappeda Kabupaten Kampar diraihnya atas piagam Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dari Gubernur Riau, dimana Kabupaten Kampar tampil sebagai terbaik I dalam Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kabupaten.

31. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN BPBD

Berdasarkan laporan realisasi keuangan dan fisik tahun 2025, BPBD Kabupaten Kampar mengelola anggaran sekitar Rp10,15 miliar yang terdiri atas program penunjang dan program penanggulangan bencana, dengan realisasi gabungan mencapai 87,1% atau Rp8,84 miliar. Angka ini tergolong cukup baik, meskipun masih berada di bawah rata-rata Organisasi Perangkat Daerah lain yang umumnya menembus 90-95%. Namun, di balik capaian tersebut, ada beberapa yang perlu mendapat perhatian.

LAPORAN AKUNTABILITAS & KINERJA BPBD KABUPATEN KAMPAR 2025



Hampir seluruh sub kegiatan dilaporkan mencapai target fisik 100%. Namun ada juga yang belum terecrap optimal, misalnya penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang hanya terserap 42,65%; rapat koordinasi dan konsultasi SKPD hanya 56,89%; serta penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang realisasinya sangat rendah, hanya 26,23%. BPBD menyatakan bahwa rendahnya realisasi logistik dan evakuasi disebabkan oleh tidak terjadinya bencana besar atau frekuensi kejadian yang lebih kecil dari perkiraan. Alasan ini masuk akal, tetapi alangkah baiknya dijelaskan bahwa rendahnya serapan terjadi pada kegiatan rutin seperti rapat koordinasi dan jasa komunikasi.

Untuk itu, saran perbaikan yang dapat diberikan antara lain: pertama, BPBD disarankan menyusun perencanaan berbasis risiko yang lebih akurat dengan menggunakan data historis dan kajian kebencanaan, serta mengalokasikan dana untuk kegiatan yang lebih pasti seperti pelatihan, simulasi, dan pemeliharaan sarana, bukan terlalu besar untuk pos respons darurat yang tidak pasti. Jika suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan biaya lebih rendah, sebaiknya target anggaran direvisi di awal tahun agar realisasi tidak menjadi rendah di akhir tahun. Tingkatkan penyerapan untuk kegiatan rutin dengan membuat komitmen belanja lebih awal. Gunakan indikator kinerja yang lebih terukur, misalnya jumlah jam pelatihan, jumlah peserta gladi, atau jumlah paket logistik yang siap disalurkan.

Dengan langkah-langkah tersebut, BPBD tidak hanya akan memperbaiki tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

32. KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pada kesempatan ini, Pansus II juga membahas tentang kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Secara umum kinerja BUMD di Kabupaten Kampar masih perlu ditingkatkan agar lebih memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan dapat berkontribusi pada pendapatan daerah.

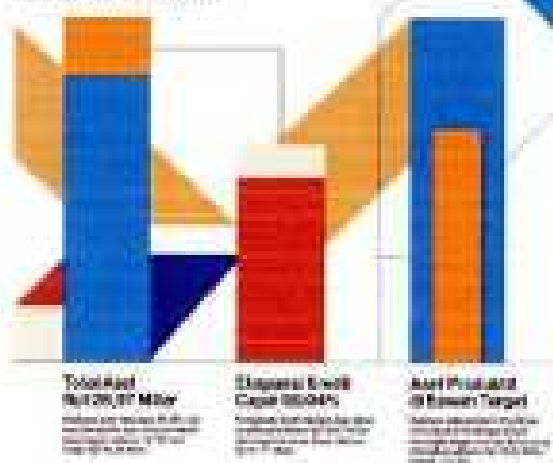
Kinerja PT BPR Sarimadu

Berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban Direksi PT BPR Sarimadu Perseroda Tahun Buku 2025, diketahui bahwa total aset

terrealisasi sebesar Rp128.970.738.000,- atau belum tercapai sebesar 10,12% dari rencana bisnis tahun 2025 yaitu sebesar Rp143.489.674.000,-.

**Performa Keuangan
PT BPR Sarimadu Perseroada:
Laporan Realisasi Tahun Buku 2025**

Realisasi 2025 (Rp. Miliar)



PERFORMA OPERASIONAL



Struktur Biaya



Indikator Kinerja Utama



in rupiah

Total aset produktif terrealisasi sebesar Rp135.167.778.000,- atau belum tercapai 12,13% dari rencana bisnis tahun 2025 yaitu sebesar Rp153.843.026.000,-. Ekspansi kredit hingga tahun 2025 terrealisasi dengan baki debit sebesar Rp120.014.109.000,-atau terrealisasi sebesar 99,04% dari rencana bisnis tahun 2025 yaitu sebesar Rp121.176.122.000,-.

Non Performance Loan (NPL) Bruto akhir tahun 2025 sebesar 13,81% dengan nominal Rp16.575.863.000,-. Loan Debit Ratio (LDR) pada akhir tahun 2025 berada pada posisi 112,40%. Return on Asset (RoA) yang dapat terrealisasi pada tahun 2025 sebesar 1,54% sedangkan Return on Equity (RoE) terrealisasi sebesar 12,33%. Pendapatan operasional tahun 2025 terrealisasi sebesar Rp33.636.729.000,- atau tercapai target rencana bisnis bank sebesar 107,44% yaitu sebesar Rp31.306.436.000,- dan pendapatan non operasional sebesar Rp328.197.000,- atau tercapai target sebesar 159,81% dari rencana bisnis tahun 2025 yaitu sebesar Rp205.368.000,-. Beban operasional tahun 2025 sebesar Rp32.070.903.000,- atau terrealisasi sebesar 107,30% dari rencana bisnis tahun 2025 yaitu Rp29.887.962.000,- dan beban non operasional teralisasi sebesar Rp107.540.000,- atau terrealisasi sebesar 151,60% dari rencana bisnis tahun 2025 yaitu Rp70.937.000,-. Pada tahun 2025, bank membukukan laba (rugi) sebesar

Rp1.786.483.000,- atau tercapai sebesar 144,37% dari rencana bisnis tahun 2025, yaitu laba sebesar Rp1.237.456.000,.

Secara keseluruhan, kinerja Bank Sarimadu pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang **kontradiktif**. Di satu sisi, laba bersih berhasil melampaui target hingga 144,37% dan pendapatan operasional maupun nonoperasional juga melesat di atas rencana bisnis, yang mengindikasikan kemampuan manajemen dalam menghasilkan pendapatan. Namun, di sisi lain, kualitas aset dan likuiditas tidak bisa diabaikan. Non-Performing Loan (NPL) bruto mencapai 13,81%, masih jauh di atas batas sehat perbankan, yang berarti lebih dari satu dari setiap delapan kredit yang disalurkan tergolong bermasalah. Ini mencerminkan pentingnya perhatian mendasar dalam manajemen risiko kredit, mulai dari proses analisis, pengawasan, hingga penagihan. Belum lagi Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 112,40%, menandakan bank membiayai kredit dengan dana yang melebihi simpanan nasabah, sehingga likuiditasnya sangat rapuh dan berisiko tinggi terhadap tekanan penarikan dana mendadak. Ditambah lagi, beban operasional dan nonoperasional membengkak melebihi target dengan persentase lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan, menunjukkan inefisiensi yang menggerus margin laba.

PT BRPS Berkah Syariah Dana Fadhillah (Perseroda)

Laporan Kinerja & Pertumbuhan PT BRPS Berkah Dana Fadhillah Perseroda (2024–2025)

Mengapa Kita Harus Berinvestasi di PT BRPS Berkah Dana Fadhillah? Kami adalah perusahaan syariah yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas dan terukur.

PERTUMBUHAN INDIKATOR UTAMA (2024–2025)



ANALISIS RASIO KEUANGAN 2025



PERFORMA LABA TERHADAP TARGET



PERFORMA LABA TERHADAP TARGET



INDIKATOR TINGKAT PERSEMAN 2025

INDIKATOR	NILAI AKTUAL	PERSEMAN
Keuntungan Bersih	21,0%	Sangat Baik
Profitabilitas	15,0%	Sangat Baik
Laba Bersih per Saham	1,0%	Sangat Baik
Keuntungan Operasional	1,0%	Sangat Baik
Keuntungan Bersih per Saham	1,0%	Sangat Baik
Keuntungan Operasional per Saham	1,0%	Sangat Baik
Rasio Keuangan & Manajemen	1,0%	Sangat Baik

Secara umum, kinerja PT BPRS Berkah Dana Fadhillah Perseroda pada tahun 2025 menunjukkan **arah pertumbuhan yang positif dan fundamental yang sehat**, meskipun masih ada beberapa catatan.

Dari sisi ekspansi usaha, aset tumbuh 11%, pembiayaan melonjak 15%, dan dana pihak ketiga meningkat 11%, ketiganya merupakan indikator yang baik, menunjukkan bahwa bank syariah ini berhasil meningkatkan skala bisnis dan kepercayaan nasabah. Kualitas aset pun terjaga dengan sangat baik, tercermin dari **Non-Performing Financing (NPF) yang turun dari 1,64% menjadi 1,25%**, jauh di bawah batas aman perbankan (biasanya <5%). Rasio kecukupan modal (CAR) 23,50%, profitabilitas (laba sebelum pajak terhadap aset) 3,20%, dan efisiensi biaya dana yang sangat minim (2,36%) karena dominasi akad wadiah, semua masuk kategori **sangat sehat**.

Namun demikian, terdapat **dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu** pertama, laba bersih justru **menurun 7%** dari tahun sebelumnya (dari Rp2,2 miliar menjadi Rp2,07 miliar), meskipun realisasi tahun 2025 sebesar Rp2,06 miliar masih melampaui target rencana bisnis (114%). Penurunan laba di tengah pertumbuhan aset dan pembiayaan yang tinggi mengindikasikan adanya **penurunan margin keuntungan** atau peningkatan beban yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan. Kedua, rasio **biaya tenaga kerja terhadap total outstanding pembiayaan mencapai 7,87%**, yang dinilai **tidak sehat**, artinya beban gaji, honor, dan tunjangan karyawan terlalu besar dibandingkan volume pembiayaan yang dikelola, sehingga menggerus efisiensi operasional.

Meskipun rasio efisiensi (BOPO) 77,16% masih tergolong sehat, jika biaya personel terus membengkak tanpa diimbangi produktivitas, profitabilitas jangka panjang akan terancam. Selain itu, rasio pembiayaan terhadap dana (FDR) hanya 70,45%, masih cukup rendah untuk BPRS, yang berarti masih banyak dana pihak ketiga yang belum disalurkan secara produktif, sehingga berpotensi menambah pendapatan jika diekspansi lebih agresif namun tetap prudent.

Saran perbaikan, pertama, perlu dilakukan secara berkala untuk menilai efisiensi dan produktivitas setiap karyawan; pertimbangkan

pemberian insentif berbasis kinerja (*variable pay*) daripada kenaikan gaji tetap yang tinggi. Kedua, tingkatkan **FDR secara bertahap** ke kisaran 80-85% dengan memperluas pembiayaan produktif ke sektor UMKM dan agribisnis yang potensial, namun tetap menjaga NPF di bawah 2%. Ketiga, evaluasi **struktur margin pembiayaan**, apakah penurunan laba disebabkan oleh penurunan rata-rata margin karena kompetisi, atau karena peningkatan beban operasional di luar tenaga kerja. Keempat, pertahankan rasio CAR yang sangat sehat (23,5%) sebagai bantalan ekspansi, dan terus jaga kualitas pembiayaan mengingat NPF saat ini sudah sangat baik. Dengan langkah-langkah tersebut, BPRS Berkah Dana Fadhillah tidak hanya tumbuh besar, tetapi juga **tumbuh menguntungkan secara berkelanjutan**.

Perumda Kampar Aneka Karya

Sepanjang tahun 2025, perusahaan membukukan total pendapatan Rp6,71 miliar, yang mana sekitar 90% dari pendapatan tersebut (Rp6,08 miliar) bersumber dari **dividen Participating Interest (PI) Wilayah Kerja Rokan** melalui PT Riau Petroleum Rokan.

Evolusi dan Transformasi Hukum

2000 - Transformasi Merger
 Transaksi MBR (Merger Bank Rakyat) menggabungkan Bank Rakyat dan Bank Bumi Daya menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).

2025 - Transformasi Merger
 Transaksi MBR (Merger Bank Rakyat) menggabungkan Bank Rakyat dan Bank Bumi Daya menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Portofolio Aset Wisata & UMKM

Manajemen Aset & Investasi
 Melakukan investasi di sektor wisata dan UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan diversifikasi aset.

Manajemen Perumahan & Perumahan
 Melakukan investasi di sektor perumahan untuk meningkatkan pendapatan dan diversifikasi aset.

Manajemen Perumahan & Perumahan
 Melakukan investasi di sektor perumahan untuk meningkatkan pendapatan dan diversifikasi aset.

Ekspansi Strategis di Sektor Migas

Dividen Transaksi Blok Rokan
 Mendapat dividen dari PT Riau Petroleum Rokan sebesar Rp6,08 miliar.

Perolehan Saham Participating Interest (PI)

Waktu Saham Didapat	Nilai Saham Perolehan Saham	Persentase Saham
100 Saham PT PRK	100 Saham Perolehan Saham	0%
100 Saham PT PRK	100 Saham Perolehan Saham	100%

Nilai Saham Blok Rokan
 Saham Blok Rokan memiliki nilai sebesar Rp6,08 miliar. Nilai ini akan digunakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham.

Ringkasan Kinerja Keuangan 2025

1.4% Laba Bersih Sebelum Pajak

10.8% Laba Bersih Setelah Pajak

1.83 Miliar Laba Bersih Setelah Pajak

6.71 Miliar Total Pendapatan

Sementara itu, pendapatan operasional dari pengelolaan Taman Rekreasi Stanum dan Bangkinang Riverside hanya menyumbang Rp631,86 juta. Laba bersih tahunan tercatat Rp1,83 miliar, tetapi jika dividen PI dikeluarkan, maka usaha inti perusahaan sebenarnya **mengalami kerugian**.

operasional karena beban operasional mencapai Rp5,14 miliar sementara pendapatan operasional hanya Rp632 juta.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk eksistensi perusahaan daerah ini ke depan adalah pentingnya **pengelolaan aset wisata yang lebih efisien**, dengan luas lahan 17,2 hektar dan berbagai fasilitas yang tersedia, pendapatan operasional hanya Rp632 juta per tahun atau rata-rata Rp52 juta per bulan, sehingga cukup untuk menutupi biaya gaji karyawan, perawatan, listrik, dan beban rutin lainnya.

Manajemen telah berupaya untuk mengurangi beban dengan melakukan kebijakan pengurangan karyawan dan efisiensi biaya, tetapi ke depan tentunya hal ini harus diikuti dengan peningkatan pendapatan. Partisipasi di Wilayah Kerja Rokan dan Bentu memberikan pendapatan besar, tetapi perusahaan tidak memiliki kendali atas besaran dividen karena bergantung pada fluktuasi harga minyak, produksi, dan kebijakan KKKS. Jika sewaktu-waktu dividen menurun atau berhenti, Perumda akan mengalami kesulitan.

Untuk lebih lengkapnya laporan perusahaan ini, kami menyarankan untuk menambahkan rincian beban operasional yang mencapai Rp5,14 miliar, dan target kinerja yang terukur. Gedung serbaguna yang sedang dibangun disebut-sebut sebagai harapan masa depan, tetapi harus disertai dengan rencana bisnis yang jelas, agar investasi tersebut tidak menjadi beban baru.

Beberapa saran lainnya panstus II untuk Perumda Kampar Aneka Karya yaitu **melakukan revitalisasi serius terhadap kawasan wisata Stanum, dengan** melakukan studi pasar untuk menentukan paket wisata yang menarik (misalnya tiket kolam renang terintegrasi dengan event olahraga, paket outbound, sewa gedung untuk pernikahan, atau kemitraan dengan biro perjalanan). Targetkan peningkatan pendapatan operasional minimal 100% dalam dua tahun.

Manajemen diharapkan mampu menyusun rencana bisnis jangka menengah yang memisahkan secara tegas antara pengelolaan aset wisata (core business) dan pengelolaan investasi saham di perusahaan migas (non-core). Jika investasi saham menguntungkan, perusahaan dapat

mempertahkannya, tetapi jangan sampai menutupi kebobrokan bisnis inti.

Gedung serbaguna yang sedang dibangun, diharapkan dapat segera tuntas pembangunannya sehingga bisa pula difungsikan dengan strategi pemasaran yang agresif. Kemudian, perusahaan wajib menyetorkan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Kampar setiap tahun sebagai kontribusi PAD, sesuai amanat pendirian BUMD.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar

Berdasarkan hasil teleah dan pembahasan kami terhadap Laporan Kinerja Tahun 2025 PERUMDAM Tirta Kampar, secara umum perusahaan menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi, terutama dalam hal peningkatan cakupan layanan yang tercermin dari bertambahnya jumlah sambungan rumah dari 11.931 menjadi 12.976, serta kenaikan pendapatan rekening air yang cukup signifikan dari Rp15,25 miliar menjadi Rp18,13 miliar. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pengoperasian SPAM baru di beberapa kecamatan, kerja sama dengan SPAM Pekanbaru-Kampar, serta komitmen perusahaan untuk tetap memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp280 juta meskipun secara aturan diperbolehkan untuk tidak menyetor laba.

Selain itu, apresiasi juga layak diberikan atas upaya perbaikan operasional seperti penggantian water meter rusak, pemasangan water meter induk, serta audit kinerja yang meraih predikat sehat.

Laporan Kinerja 2025: Dedikasi PERUMDAM Tirta Kampar untuk Masyarakat

Profil & Visi Perusahaan



Visi Komersialitas Air Bersih
 Menghasilkan air bersih berkualitas tinggi, terjangkau, dan berkelanjutan untuk masyarakat.



Jangkauan 16 Wilayah Pelayanan
 Menjangkau 16 Kecamatan dan 100 Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar.

Realisasi Kinerja ESG
 Berkomitmen untuk ESG (Environmental, Social, Governance) sebagai fondasi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Performa Operasional (M3)



Produksi Air 100 Juta M3
 100% sesuai target berdasarkan rencana produksi.

Kelembutan Air 104 Juta M3
 Menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat.



Pertumbuhan Layanan & Pelanggan

12.976

Sambungan Rumah (SR)
 Menunjukkan pertumbuhan SR dari 12.000 menjadi 12.976 sambungan rumah.



Taruik Air Bersih (TAB) 1.111
 Menunjukkan peningkatan TAB dari 1.000 menjadi 1.111 taruik air bersih.

771

Pemutusan Tagas
 Menunjukkan penurunan pemutusan tagas dari 800 menjadi 771 pemutusan tagas.

Capex Keuangan & SDM

Rp 18,13 Miliar

Perencanaan Anggaran
 Menunjukkan alokasi anggaran sebesar Rp 18,13 miliar.

Rp 280.000.000

Kreditasi/PO
 Menunjukkan nilai kreditasi/PO sebesar Rp 280.000.000.

121 Personel

Pengadaan SDM
 Menunjukkan jumlah pengadaan SDM sebesar 121 personel.

Tantangan Strategis



Tingkat Kehilangan Air (TKA)
 Menunjukkan tantangan dalam mengurangi tingkat kehilangan air.



Biaya Bahan Baku & Energi
 Menunjukkan tantangan dalam mengelola biaya bahan baku dan energi.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Tingkat kehilangan air yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mengalami peningkatan dari 638.274 m³ menjadi 729.281 m³, atau sekitar 22,4 persen dari total produksi, yang mana angka ini masih di atas standar ideal. Hal ini disebabkan antara lain oleh kebocoran pipa distribusi dan masih adanya tindak pencurian water meter.

Di sisi lain, jumlah pemutusan sambungan akibat tunggakan juga naik dari 678 menjadi 771 pelanggan, yang mengindikasikan bahwa kesadaran membayar masyarakat masih perlu terus ditingkatkan, dan sistem penagihan barangkali perlu dievaluasi agar lebih persuasif. Perusahaan juga menghadapi beban biaya operasional yang cukup tinggi, terutama biaya listrik yang melonjak dari Rp2,68 miliar menjadi Rp3,02 miliar serta biaya bahan kimia yang ikut meningkat, sementara beberapa unit IKK masih mengandalkan genset dengan bahan bakar solar dan membutuhkan subsidi.

Kepada segenap jajaran manajemen PERUMDAM Tirta Kampar, kami ingin menyampaikan beberapa saran perbaikan ke depan. Pertama, untuk menekan angka kehilangan air, langkah baiknya jika dibentuk tim khusus pengendali kebocoran dengan menggunakan alat deteksi kebocoran portabel, serta dilakukan pengamanan water meter dari potensi kecurian. Kedua, dalam rangka menurunkan angka pemutusan, dapat

dipertimbangkan program penagihan yang lebih humanis seperti pengingat berkala melalui pesan singkat, kerja sama dengan tokoh masyarakat, atau penyediaan opsi angsuran bagi pelanggan kurang mampu.

Ketiga, guna mengendalikan biaya operasional, sangat disarankan untuk melakukan kajian ulang jadwal pemompaan agar memanfaatkan jam listrik di luar beban puncak, serta mengevaluasi dosis pemakaian bahan kimia secara berkala. Keempat, penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang terfokus, seperti pengelolaan instalasi pengolahan air, manajemen keuangan, dan pelayanan pelanggan, akan sangat membantu meningkatkan profesionalisme perusahaan. Terakhir, agar laporan kinerja ke depan semakin berkualitas, mohon kiranya dapat ditambahkan ringkasan eksekutif, indikator kinerja utama yang jelas, serta analisis singkat atas setiap perubahan data, disertai dengan ketelitian penyuntingan agar dokumen ini semakin kredibel dan transparan. Semoga PERUMDAM Tirta Kampar terus berkembang menjadi kebanggaan daerah Kabupaten Kampar.

PT Bumi Kampar Sarana Energi (BKSE) Perseroda

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban tahun 2025, PT Bumi Kampar Sarana Energi (BKSE) belum memiliki kinerja yang optimal, dan masih perlu bekerja keras lagi untuk menjadi perusahaan daerah yang produktif.



Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan sejak tahun 2012 ini, namun belum memperoleh **penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kampar**, meskipun modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp100 miliar. Akibatnya, modal yang tercatat dalam neraca hanya Rp25 miliar, dan perusahaan tidak dapat beroperasi secara maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, yaitu bergerak di bidang jasa pertambangan minyak, gas bumi, energi baru terbarukan, serta tambang mineral dan batuan lainnya.

Dari sisi kinerja keuangan, total aset BKSE pada tahun 2025 tercatat Rp28,04 miliar, tumbuh tipis 1,2% dibanding tahun sebelumnya. Hampir seluruh aset tersebut berupa **piutang sebesar Rp25 miliar** (89% dari total aset) yang sama persis dengan angka tahun 2024. Piutang sebesar ini tentunya membebani likuiditas perusahaan dan sebaiknya dijelaskan secara rinci asal-usul serta upaya penagihannya.

Sementara itu, kas dan setara kas hanya Rp2,82 miliar, sangat kecil dibandingkan total aset. Laba tahun berjalan juga merosot drastis, dari Rp886,59 juta pada tahun 2024 menjadi **Rp302,26 juta pada tahun 2025** (turun 66%). Pendapatan usaha inti (dari penyewaan mobil) hanya Rp61,6 juta.

Sebagian besar pendapatan berasal dari pendapatan di luar usaha (mungkin jasa giro atau bagi hasil dari investasi) sebesar Rp610,6 juta, namun karena beban usaha yang membengkak menjadi Rp364,95 juta, laba bersih akhirnya tipis.

Ada tiga permasalahan yang perlu diperhatikan terkait BKSE ini, yaitu pertama, belum adanya penyertaan modal Pemkab Kampar, tanpa penyertaan modal ini BKSE tidak dapat mengembangkan usaha, membeli aset produktif, atau menjalankan proyek-proyek strategis. Kedua, **kinerja operasional perlu ditingkatkan**, pendapatan usaha inti hanya Rp61,6 juta setara dengan rata-rata Rp5 juta per bulan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki model bisnis yang *viable*.

Ketiga, perlunya penguatan **tata kelola**, karena susunan pengurus yang masih berstatus "Pelaksana Tugas" (Plt) baik komisaris maupun direktur, serta tidak adanya laporan tentang dividen yang disetor ke kas

daerah (PAD). Perubahan pengurus terjadi di tengah tahun (Mei dan Juni 2025) dan kembali berganti di Maret 2026 menandakan ketidakstabilan manajemen. Selain itu, realisasi RKAP 2025 hanya 29,02% karena alasan efisiensi, namun efisiensi tanpa kegiatan usaha tidak akan pernah menghasilkan laba.

Saran perbaikan yang mendesak adalah: pertama, Pemerintah Kabupaten Kampar perlu membicarakan tentang **penyertaan modal** sesuai Perda, minimal 25% dari modal dasar (Rp25 miliar) agar BKSE memiliki dana untuk beroperasi dan memenuhi kewajiban sebagai pemegang saham di anak perusahaan (PT Riau Petrokem Sialk dan Mahato). Kedua, BKSE perlu **menyusun rencana bisnis yang realistis** dengan fokus pada satu atau dua bidang usaha yang paling potensial, misalnya partisipasi dalam proyek gas bumi di Sialk Hulu atau pengolahan galena di XIII Koto Kampar, dan jangan menyebar ke terlalu banyak bidang tanpa modal.

Ketiga, segera **tuntaskan piutang Rp25 miliar**, jika piutang tersebut berasal dari Pemda atau pihak terkait, maka harus ada jadwal pembayaran yang jelas; jika macet, bentuk tim penagihan khusus. Keempat, disarankan untuk dilakukan **restrukturisasi manajemen** dengan mengangkat direktur dan komisaris definitif yang memiliki kompetensi di bidang energi dan pertambangan, bukan sekadar penugasan sementara.

Kelima, sangat penting untuk dilakukan peningkatan **pengawasan** terhadap penggunaan anggaran dan realisasi RKAP, serta BKSE harus menyetorkan dividen sesuai ketentuan berlaku dari laba bersih setiap tahun untuk kontribusi PAD. Dengan langkah-langkah tersebut, BKSE dapat bertransformasi dari perusahaan "papan nama" menjadi BUMD yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi Kabupaten Kampar.

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan beberapa pesan penting kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, antara lain:

- a. Ada dua Kepala OPD yang tidak hadir dalam pembahasan LKPJ bersama Pansus II yaitu Kepala Dinas PUPK dan Kepala BPKAD. Hal ini diharapkan menjadi perhatian serius Bapak Bupati agar dapat memberikan teguran, sehingga hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

- b. Terdapat kesalahan input data pada beberapa laporan kinerja OPD. Hal ini menandakan perlu ada ketelitian yang lebih baik lagi sehingga data yang disajikan merupakan data yang valid dan detail.
- c. Terkait kinerja BUMD, dalam LKPj kami hanya menemukan data secara implisit. Namun kami mengapresiasi sikap proaktif para Direktur BUMD yang secara cepat menyerahkan data laporan kinerja untuk dibahas bersama.
- d. Terjadi satu *missing data* OPD dalam LKPj, yakni laporan kinerja OPD Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun OPD terkait telah menyerahkan kepada kami untuk dibahas bersama pada waktu yang telah dijadwalkan.

BAB VI PENUTUP

Demikian **REKOMENDASI** DPRD Kabupaten Kampar terhadap LKPj Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025. Kritik dan saran yang kami berikan bukan atas dasar *like and dislike* atau suka dan tidak suka, melainkan wujud tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat dan untuk perbaikan yang perlu kita lakukan bersama, demi Kabupaten Kampar yang kita cintai ini. Kami juga mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan, termasuk menuntaskan LKPj tahun 2025 ini.

Semoga rekomendasi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, terutama Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat ke depan.

Demikianlah Rekomendasi DPRD ini disampaikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, *Aamiin Yaa Robbalalamin*.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 20 April 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

Ketua



AHMAD TARIDI